

## KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN

- **Program Restrukturisasi Mesin Industri Tekstil Indonesia:  
Sebuah Studi Kasus Kebijakan Subsidi Pemerintah**
  
  - **Overview Atas Transparansi Fiskal Dalam Perspektif Risiko:  
Suatu Komparatif dan Studi Literatur**
  
  - **Sustainability Reporting For CSR Disclosures: A Case Study In  
Oil and Gas Industry**
  
  - **Desentralisasi Fiskal dan Penciptaan Stabilitas Keuangan  
Daerah**
  
  - **Analisis Kebijakan Pendanaan Penjaminan Simpanan  
Indonesia**
- 
- **Tulisan Lepas:  
Stabilitas Sistem Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi yang  
Berkelanjutan dalam Rangka Mewujudkan Negara  
Kesejahteraan**

# KAJIAN

## EKONOMI KEUANGAN



Pusat Kebijakan Ekonomi Makro  
Badan Kebijakan Fiskal  
Departemen Keuangan RI

■ Program Restrukturisasi Mesin Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia:

Sebuah Studi Kasus Kebijakan Subsidi Pemerintah

■ Overview Atas Transparansi Fiskal Dalam Perspektif Risiko: Suatu Komparatif dan Studi Literatur

■ Sustainability Reporting For CSR Disclosures:  
A Case Study In Oil and Gas Industry

■ Desentralisasi Fiskal dan Penciptaan Stabilitas Keuangan Daerah

■ Analisis Kebijakan Pendanaan Penjaminan Simpanan Indonesia

■ Tulisan Lepas : Stabilitas Sistem Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Negara Kesejahteraan



## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kajian Ekonomi Keuangan pada volume kali ini dapat menjumpai pembaca sekalian. Edisi ini menyajikan berbagai topik yang beragam dan menarik dalam konteks perkembangan ekonomi dan keuangan.

Pada volume kali ini ada berbagai topik tulisan yaitu Program Restrukturisasi Mesin Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia: Sebuah Studi Kasus Kebijakan Subsidi Pemerintah, Overview Atas Transparansi Fiskal Dalam Perspektif Risiko: Suatu Komparatif dan Studi Literatur, *Sustainability Reporting For CSR Disclosures: A Case Study in Oil and Gas Industry*, Desentralisasi Fiskal dan Penciptaan Stabilitas Keuangan Daerah, Analisis Kebijakan Pendanaan Penjaminan Simpanan Indonesia, dan Tulisan Lepas: Stabilitas Sistem Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Negara Kesejahteraan. Adapun para penulis yang berkontribusi yaitu Sigit Setiawan, Joko Tri Haryanto, Ester Sri Astuti, Makhiani, Moudy Hermawan, Parulian Sihotang, Subagio Effendi, dan Muslimin B. Putra.

Demikianlah sekapur sirih yang bisa disampaikan oleh Dewan Redaksi. Ibarat peribahasa tiada gading yang tak retak, maka kami menyadari tulisan ini tentulah ada kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dari para pembaca guna perbaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya, kami berharap Kajian ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca. Selamat membaca.

Jakarta, 2009

Dewan Redaksi



## DAFTAR ISI

Cover	
Dewan Redaksi .....	ii
Sekapur Sirih .....	v
Daftar Isi .....	vii
Dafta Tabel .....	viii
Daftar Gambar .....	x
Abstraksi .....	xi
<b>Program Restrukturisasi Mesin Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia: Sebuah Studi Kasus Kebijakan Subsidi Pemerintah</b>	
Oleh: Moudy Hermawan .....	1
<b>Overview Atas Transparansi Fiskal Dalam Perspektif Risiko: Suatu Komparatif dan Studi Literatur</b>	
Oleh: Makhilani .....	11
<b><i>Sustainability Reporting For CSR Disclosures: A Case Study In Oil and Gas Industry</i></b>	
Oleh: Parulian Sihotang and Subagio Effendi .....	31
<b>Desentralisasi Fiskal dan Penciptaan Stabilitas Keuangan Daerah</b>	
Oleh: Joko Tri Haryanto dan Ester Sri Astuti.....	49
<b>Analisis Kebijakan Pendanaan Penjaminan Simpanan Indonesia</b>	
Oleh: Sigit Setiawan .....	63
<b>Tulisan Lepas : Stabilitas Sistem Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Negara Kesejahteraan</b>	
Oleh: Muslimin B. Putra .....	81

## DAFTAR TABEL

### **Program Restrukturisasi Mesin Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia:**

#### **Sebuah Studi Kasus Kebijakan Subsidi Pemerintah**

Tabel 1 Volume Ekspor-Impor Produk TPT (Ribu US \$) .....	2
Tabel 2 Tiga besar sektor industri penyumbang Nilai Tambah Produksi (miliar rupiah) .....	3
Tabel 3 Peran ekspor product TPT .....	3
Tabel 4 Tingkat utilisasi kapasitas produksi (%) .....	4
Tabel 5 Realisasi investasi tiga sektor industri terbesar .....	4
Tabel 6 Perkembangan program TUFSS .....	7
Tabel 7 Perbedaan Pembiayaan Industri Antara Indonesia dan India .....	7

### ***Sustainability Reporting For CSR Disclosures:***

#### ***A Case Study In Oil and Gas Industry***

<i>Table 1 Characteristics of Sustainability Reporting (Gray et.al.,1986) .....</i>	40
<i>Table 2 Trend of Sustainability Reporting 2003-2005 (Sihotang and Margareth, 2008) .....</i>	40
<i>Table 3 Sustainability Reporting Companies in Indonesia (IAMJ,2008) .....</i>	41
<i>Table 4 Reporting Aspects Application Level for BP.....</i>	42
<i>Table 5 Reporting Aspects Application Level for Chevron .....</i>	43
<i>Table 6 Reporting Aspects Application Level for Exxon Mobil .....</i>	44
<i>Table 7 Reporting Aspects Application Level for Total .....</i>	45
<i>Table 8 Reporting Aspects Application Level for Medco Energi .....</i>	46

### **Desentralisasi Fiskal dan Penciptaan Stabilitas Keuangan Daerah**

Tabel 1 Instrumen Desentralisasi Fiskal Sisi Penerimaan .....	53
Tabel 2 Persamaan Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Makroekonomi .....	57

### **Analisis Kebijakan Pendanaan Penjaminan Simpanan Indonesia**

Tabel 1 Daftar Negara-negara yang membentuk Sistem Penjaminan Simpanan Eksplisit dalam 10 tahun terakhir .....	66
---	----

Tabel 2 Periode dan Batas Maksimal Penjaminan .....	67
Tabel 3 Nama Bank Gagal (September) 2005 - 2007 .....	68
Tabel 4 Negara-negara yang menerapkan pendekatan Ex Ante .....	69
Tabel 5 Negara-negara yang menerapkan kebijakan pendanaan Ex Post .....	70
Tabel 6 Negara-negara yang menerapkan kebijakan pendanaan Hibrid .....	71
Tabel 7 Perbandingan Sistem Premi Indonesia dengan Negara-Negara Lain Dalam Kelas Income yang Sama yang Memiliki Sistem Penjaminan Simpanan Eksplisit .....	72
Tabel 8 Kompilasi Analisis Perbandingan Pendekatan Ex Ante vs Ex Post .....	75

## DAFTAR GAMBAR

### **Overview Atas Transparansi Fiskal Dalam Perspektif Risiko:**

#### **Suatu Komparatif dan Studi Literatur**

Gambar 1 Kerangka Model Risiko Ekonomi .....	21
Gambar 2 Kerangka model macrostress test .....	22

### ***Sustainability Reporting For CSR Disclosures:***

#### ***A Case Study In Oil and Gas Industry***

<i>Figure 1 Overview of GRI G3 Sustainability Reporting Guidelines (GRI)</i> .....	47
<i>Figure 2 Frequency of Sustainability Reporting Disclosures</i> <i>(Sihotang and Margareth, 2008)</i> .....	47

### **Desentralisasi Fiskal dan Penciptaan Stabilitas Keuangan Daerah**

Gambar 1 Pola Kewenangan dan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah di Era Desentralisasi Fiskal .....	49
---	----

## MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN

ISSN 1410-3249

Volume 13 Nomor 1, 2009

*Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.*

## ABSTRAKSI

**Hermawan, Moudy et. al. (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Depkeu RI)****Program Restrukturisasi Mesin Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia: Sebuah Studi Kasus Kebijakan Subsidi Pemerintah****Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 13 Nomor 1, 2009, halaman 1-10**

Subsidi yang sering dianggap distorsi dalam perekonomian, sebenarnya juga diperlukan sebagai sarana bagi pemerintah untuk membantu sektor-sektor potensial yang mendapat kesulitan untuk berkembang. Dalam hal Industri TPT yang sempat dipersepsikan sebagai *sunset industry*, terutama setelah banyaknya kredit macet pasca krisis moneter, sebenarnya menyimpan potensi ekonomi yang besar apabila pertumbuhannya tetap dijaga. Sebagai sektor yang berprestasi dalam menyumbangkan PDB, ekspor nonmigas, penggerak investasi dan penyerap tenaga kerja, ITPT yang saat ini sedang menghadapi problem lemahnya daya saing akibat rendahnya efisiensi produksi layak mendapat bantuan dari pemerintah melalui subsidi langsung yang ditransmisikan dengan tepat.

Kata kunci : Subsidi, TPT, ITPT, Pemerintah

**Makhiani et. al. (Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan RI)****Overview Atas Transparansi Fiskal Dalam Perspektif Risiko: Suatu Komparatif dan Studi Literatur****Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 13 Nomor 1, 2009, halaman 11-31**

Untuk pertama kalinya, Pernyataan Risiko Fiskal (*Statement of Fiscal Risks*) diungkap dalam Nota Keuangan APBN 2008, sebagai praktek baru di bidang keuangan negara untuk menyatakan adanya risiko fiskal. Pengungkapan (*disclosure*) risiko fiskal sangat penting dilakukan, karena *awareness* terhadap bahaya ada risiko tersembunyi akan meningkat sehingga diharapkan otoritas fiskal akan mampu merespons dengan baik kemungkinan adanya ancaman terhadap ekonomi nasional pada tahun-tahun mendatang. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan risiko fiskal, maka studi banding dan literatur merupakan suatu yang perlu dilakukan. Membandingkan praktek pengungkapan risiko fiskal dengan Australia, New Zealand, dan Brazil, dan mendalami literatur yang terkait dengan pengelolaan risiko fiskal akan memperoleh gambaran sejauh mana Indonesia telah melaksanakan *best practices and codes*. Terdapat 2 (dua) temuan penting yang patut dipelajari lebih lanjut yaitu Pernyataan Risiko Fiskal harus didasari

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN

ISSN 1410-3249

Volume 13 Nomor 1, 2009

Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.

ABSTRAKSI

peraturan perundangan yang kuat dan dapat mengikat semua pihak pencetus risiko (*contracting agencies*), dan ketiga negara tersebut di atas semakin mampu membagi dan memecah (*unbundling*) risiko.

Kata kunci : Risiko fiskal, APBN, transparansi

Sihotang, Parulian and Subagio Effendi et. al. (Departemen Keuangan)

***Sustainability Reporting For CSR Disclosures: A Case Study In Oil and Gas Industry***

Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 13 Nomor 1, 2009, halaman 33-49

*Sustainability Reporting has been used quite extensively in communicating company accountability towards its broad-based stakeholders. The report, widely known as the triple bottom line (TBL) report, discloses three performance indicators of any company: economic, social and environmental performance. Social and environmental performance are usually understood as Corporate Social Responsibility (CSR).*

*This article will investigate how Sustainability Reporting principles developed by the Global Reporting Initiatives (GRI) have been implemented by the oil and gas industry in order to stimulate and enhance CSR practices and disclosures. GRI-based sustainability reporting is currently the most recognized reporting principles implemented by various industries worldwide.*

*Content analysis on selected Sustainability Reporting of selected international oil companies will be conducted to identify the extent to which their CSR practices and disclosures have been in line with GRI principles. Furthermore, this research will explore whether CSR reporting applied by international oil multinationals could be implemented in developing countries such as Indonesia.*

*Finally, it is expected that this exploratory research will be able to introduce and develop the Indonesian principles on CSR disclosures using GRI-based Sustainability Reporting published by the oil and gas companies operating in Indonesia.*

Keywords : *Corporate Social Responsibility, Disclosures, Sustainability Reporting, Oil and Gas Companies.*

**MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN**

ISSN 1410-3249

Volume 13 Nomor 1, 2009

***Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.*****ABSTRAKSI****Haryanto, Joko Tri dan Ester Sri Astuti et. al. (Departemen Keuangan)****Desentralisasi Fiskal dan Penciptaan Stabilitas Keuangan Daerah****Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 13 Nomor 1, 2009, halaman 51-65**

*Indonesia has been implemented decentralization era since 2001th in order to increasing local empowerment and local capability. During this period central government gave a all of the authority to the local government excepted authority for the political, finance, national defence, justice and religion. Beside gave the authority to the local government, central government also gave the source of the financing to the local government to meet the money follows function principle.*

*Financial stability is the most important things on the monetary area. Many theorytical background described that decentralization have relation with the local financial stability. Using statistic approach (panel data) we could be proved that decentralization have negative relation with the local financial stability and also the other variable such as population, GRDP, construction price index and volatility of money .*

*Key words : Financial stability, decentralization*

**Setiawan, Sigit et. al. (Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan RI)****Analisis Kebijakan Pendanaan Penjaminan Simpanan Indonesia****Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 13 Nomor 1, 2009, halaman 51-65**

Sistem penjaminan simpanan merupakan bagian tak terpisahkan dari jaring pengaman keuangan (*financial safety net*) suatu negara. Sistem ini dibentuk oleh berbagai kebijakan kunci yang salah satunya adalah kebijakan pendanaan penjaminan simpanan. Dalam tulisan ini dikaji kebijakan pendanaan yang berlaku saat ini, alternatif kebijakan lain, kelebihan dan kekurangan masing-masing kebijakan, serta rekomendasi guna menutup kelemahan kebijakan pendanaan penjaminan simpanan yang digunakan saat ini.

Dari sisi kebijakan tingkat premi, tingkat premi yang diterapkan oleh sistem penjaminan simpanan Indonesia saat ini tergolong moderat (tingkat premi saat ini 0,1% per semester atau 0,2% per tahun), karena berada di tengah-tengah rentang premi penjaminan kelompok negara-negara di dunia dalam kelas pendapatan yang sama dengan Indonesia. Tingkat premi tersebut cukup kondusif bagi perbankan Indonesia karena turut andil dalam memberikan cukup ruang bagi perbankan untuk memperbaiki tingkat kesehatan pasca krisis (NPL) dan memupuk modal dari laba (pendapatan bunga bersih) yang diperoleh untuk pengembangan usahanya.

Guna memenuhi kepastian hukum dan sebagai antisipasi bila di masa depan cadangan penjaminan kurang dari target 2,5% atau tidak mencukupi, LPS perlu segera

**MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN**

**ISSN 1410-3249**

**Volume 13 Nomor 1, 2009**

***Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.***

**ABSTRAKSI**

mendorong pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan di bawah UU yang mengatur mekanisme penyediaan bantuan pinjaman pemerintah dalam kondisi tidak memadainya atau tidak mencukupinya cadangan penjaminan.

*Keyword* : *Financial Safety Net, LPS, Ex Ante, dan Ex Post.*

# PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL INDONESIA: SEBUAH STUDI KASUS KEBIJAKAN SUBSIDI PEMERINTAH

Oleh:  
Moudy Hermawan\*)

\*) Staf pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan

## Abstraksi

Subsidi yang sering dianggap distorsi dalam perekonomian, sebenarnya juga diperlukan sebagai sarana bagi pemerintah untuk membantu sektor-sektor potensial yang mendapat kesulitan untuk berkembang. Dalam hal Industri TPT yang sempat dipersepsikan sebagai *sunset industry*, terutama setelah banyaknya kredit macet pasca krisis moneter, sebenarnya menyimpan potensi ekonomi yang besar apabila pertumbuhannya tetap dijaga. Sebagai sektor yang berprestasi dalam menyumbangkan PDB, ekspor nonmigas, penggerak investasi dan penyerap tenaga kerja, ITPT yang saat ini sedang menghadapi *Problem* lemahnya daya saing akibat rendahnya efisiensi produksi layak mendapat bantuan dari pemerintah melalui subsidi langsung yang ditransmisikan dengan tepat.

Kata kunci : Subsidi, TPT, ITPT, Pemerintah.

## 1. PENDAHULUAN

Dalam terminologi ekonomi, subsidi merupakan salah satu bentuk transfer dari pemerintah kepada masyarakat, baik dalam bentuk manfaat yang diterima langsung oleh masyarakat maupun melalui dunia usaha. Pada dasarnya dengan memberikan subsidi pemerintah bermaksud mengontrol tingkat harga yang berlaku di pasar untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan memacu pertumbuhan pada sektor ekonomi yang disubsidi. Dengan kata lain, secara makro, pemerintah melaksanakan subsidi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDB) melalui peningkatan permintaan dan penawaran *aggregate*, yang mana peningkatan *output* yang diharapkan pemerintah tersebut memberikan dua konsekuensi yang berbeda terhadap harga yaitu kenaikan harga (karena meningkatnya permintaan) dan penurunan harga (karena meningkatnya penawaran). Karena dampaknya terhadap harga tersebut maka subsidi cenderung untuk mendistorsi perekonomian (sebagaimana pajak yang merupakan kebalikan

dari subsidi juga merupakan distorsi dalam ekonomi).

Kebijakan subsidi yang dilaksanakan oleh pemerintah dibedakan atas dua jenis yaitu yang sifatnya langsung dan tidak langsung, dimana perbedaan kedua subsidi ini ditentukan oleh penerima (*recipients*) subsidi dan bukan oleh penikmat manfaat (*beneficiaries*) dari subsidi<sup>1</sup>. Subsidi langsung

---

<sup>1</sup> Penerima subsidi adalah kelompok yang menerima secara langsung dana (uang ataupun fasilitas yang bernilai ekonomi dari suatu kebijakan subsidi) dari pemerintah sedangkan penikmat manfaat adalah pihak yang mendapatkan manfaat (*benefit*) dari kebijakan subsidi. Misalnya kebijakan pemberian dana makanan tambahan bagi anak sekolah untuk bantuan membeli susu melalui kebijakan Pemberian Makanan Tambahan-Anak Sekolah (PMT-AS) yang dikeluarkan oleh pemerintah zaman orde baru, penerima subsidi adalah masyarakat (dalam hal ini anak sekolah), sedangkan penikmat manfaatnya sangat ditentukan oleh elastisitas harga susu tersebut. Apabila kebijakan PMT-AS tersebut tidak membuat harga susu bergerak naik, maka anak sekolah adalah *recipient* sekaligus *beneficiary*, namun apabila harga susu menjadi naik maka produsen susu adalah *beneficiary* dari kebijakan tersebut karena pendapatannya

adalah subsidi yang berbentuk transfer dana dari pemerintah kepada penerima subsidi, subsidi ini dapat berbentuk subsidi konsumsi (untuk meningkatkan konsumsi masyarakat), subsidi produksi (untuk menekan biaya produksi yang bertujuan menurunkan harga jual dan meningkatkan daya saing produk) dan subsidi infrastruktur (untuk meningkatkan atau memperbaiki infrastruktur pada suatu kluster ekonomi tertentu). Sedangkan subsidi tidak langsung tidak menggunakan dana tunai yang dikeluarkan dari anggaran pemerintah sebagai transmisi untuk menyalurkan subsidi, melainkan dengan kebijakan-kebijakan berupa fasilitas yang bernilai ekonomis dan ditujukan pada suatu sektor ataupun kluster ekonomi tertentu. Subsidi tidak langsung ini dapat berbentuk subsidi pajak ataupun bea masuk, proteksi dagang, subsidi ekspor, regulasi pengadaan barang dan atau jasa, maupun regulasi bisnis yang secara ekonomi menguntungkan sektor tertentu. Karena sifatnya yang cenderung distortif, maka anggapan umum yang timbul terhadap subsidi cenderung berkonotasi negatif, terutama subsidi tidak langsung atau *hidden subsidy* karena kurang transparan (baik dari segi proses maupun hasil) dibandingkan dengan subsidi langsung.

Dalam kaitannya dengan anggaran pemerintah (APBN), terdapat dualisme terhadap pencatatan alokasi dana untuk subsidi. Selain pengeluaran yang tertuang

dalam klasifikasi belanja bantuan sosial juga terdapat pengeluaran-pengeluaran yang pada hakikatnya juga merupakan subsidi misalnya Bantuan Operasional Sekolah, subsidi keselamatan transportasi, subsidi untuk Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT), subsidi *converter kit* untuk kendaraan umum berbahan bakar gas, dan masih banyak bantuan lain yang dialokasikan dalam belanja bantuan sosial di kementerian/lembaga. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, alokasi anggaran untuk belanja subsidi cenderung menurun, dari Rp120.765,3 miliar (4,3 persen terhadap PDB) pada tahun 2005 menjadi Rp107.431,8 miliar (3,2 persen terhadap PDB) pada tahun 2006, dan diperkirakan Rp105.153,9 miliar (2,8 persen terhadap PDB) pada RAPBN-P tahun 2007. Demikian pula, proporsinya terhadap belanja negara cenderung menurun, dari 23,7 persen pada tahun 2005 menjadi 16,1 persen pada tahun 2006, dan diperkirakan 14,1 persen pada tahun 2007. Belanja subsidi sendiri sebagian besar (di atas 80 persen) dialokasikan untuk subsidi energi (bahan bakar dan listrik), karena mempunyai dampak pengganda kepada masyarakat maupun seluruh sektor ekonomi yang sangat signifikan, sehingga menjadi bagian dari keputusan politik pemerintah.

Dalam alokasi APBN untuk subsidi nonenergi yang proporsinya hanya 20 persen tersebut antara lain terdapat alokasi dana untuk subsidi kepada Industri Tekstil dan Produk

Tabel 1. Volume Ekspor-Impor Produk TPT (Ribu US \$)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
ekspor	8,264,868	7,274,488	6,841,962	7,014,919	7,323,345	8,359,893	9,377,336	9,768,100
import	2,245,760	1,906,654	1,616,379	1,254,698	1,634,208	3,573,797	4,009,442	4,241,365

Sumber: Bank Indonesia, data diolah

dalam klasifikasi belanja subsidi seperti subsidi energi (BBM dan listrik), subsidi pertanian (pupuk dan benih), subsidi pangan (minyak goreng) dan subsidi bunga kredit program (KPR, Rusunami, Ketahanan Pangan, dll.), di

meningkat, sedangkan anak sekolah relatif tidak mendapatkan manfaat yang berarti karena manfaat dari uang yang diterima telah di-*offset* oleh kenaikan harga susu.

Tekstil yang mulai diimplementasikan pada tahun 2007 sebesar Rp255 miliar dan tahun 2008 sebesar Rp336 miliar yang bentuknya antara lain berupa potongan harga pembelian mesin dan bantuan pembiayaan dengan subsidi bunga. Departemen Perindustrian mengalokasikan dana untuk program ini untuk menjaga pertumbuhan ITPT yang memberikan sumbangan tidak kecil bagi sektor industri secara keseluruhan baik dalam hal *volume* ekspor, penyerapan tenaga kerja, maupun

pemenuhan kebutuhan permintaan dalam negeri akan komoditi yang merupakan kebutuhan dasar manusia ini. Bagian berikut dari tulisan ini akan mengupas lebih lanjut mengenai subsidi ITPT untuk mendapatkan deskripsi yang lebih baik tentang kondisi ITPT dan pengaruh program subsidi restrukturisasi mesin ITPT bagi perekonomian.

## 2. INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL: SUNSET INDUSTRY?

Sektor industri di Indonesia merupakan penyokong utama ekonomi Indonesia yang ironisnya adalah negara maritim-agraris. Sejak tahun 2003 sektor industri secara konsisten menyumbang 28 persen dari PDB dibandingkan dengan sektor pertanian/peternakan/perikanan yang hanya berkisar 15 persen dan sektor perdagangan/pariwisata yang sumbangannya 16 persen dari PDB. Di dalam sektor industri sendiri, Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) merupakan cabang dari industri

dimulai pada awal 1970, ketika masuknya investasi Jepang di sektor hulu (*industri cotton spinning & man-made fiber manufacturing*). Pada 1979 hingga 1985, industri tekstil Indonesia tumbuh lamban, yakni hanya memenuhi pasar domestik segmen menengah rendah (*substitusi impor*). Pada 1986, industri tekstil Indonesia mulai tumbuh pesat. Disamping itu faktor regulasi pemerintah yang memfokuskan ekspor nonmigas dan adanya devaluasi rupiah sekitar 45 persen membuat peningkatan itu terus berlanjut hingga 1997, bahkan industri tekstil nasional ditetapkan sebagai industri strategis dan menjadi andalan penghasil devisa negara dari sektor nonmigas. Krisis ekonomi tahun 1997 turut mempengaruhi terjadinya perlambatan pertumbuhan ITPT, bahkan setelah keluar dari masa krisis sektor ITPT belum menunjukkan adanya perbaikan kondisi dan pertumbuhannya justru menurun dari 4,23 persen tahun 2004, 1,3 persen tahun 2005 dan menjadi 1,23 persen pada tahun 2006.

Tabel 2. Tiga besar sektor industri penyumbang Nilai Tambah Produksi (miliar rupiah)

	Nilai Tambah / Proporsi terhadap total industri					
	2001	2002	2003	2004	2005	Rata-rata
Makanan/minuman/tembakau	65.838,00	79.354,00	81.788,00	88.928,00	99.015,00	82.984,60
	24,70%	25,60%	25,03%	24,77%	24,97%	25,01%
Kimia/barang karet/plastik	38.723,00	43.319,00	51.656,00	56.289,00	65.655,00	51.128,40
	14,52%	13,98%	15,81%	15,68%	16,56%	15,31%
Tekstil/Produk Tekstil	25.692,00	35.143,00	36.107,00	38.537,00	38.038,00	34.703,40
	9,64%	11,34%	11,05%	10,74%	9,60%	10,47%
Total Industri	266.564,00	309.959,00	326.784,00	358.910,00	396.438,00	331.731,00

Sumber : BPS, data diolah

Tabel 3. Peran ekspor product TPT

Jenis Produk (SITC 2 digit)	2002	2003	2004	2005	2006
65 (Benang Tenun, kain tekstil) RCA=3,20-8,10	2895,8	2922,7	3151,9	3446,6	3614
84 (Pakaian jadi) RCA=1,84-3,26	3945	4105,3	4454,2	5106,4	5760,5
Jumlah	6840,8	7028	7606,1	8553	9374,5
Peran terhadap industri	15,19%	14,82%	13,60%	12,88%	11,78%

Sumber : Departemen Perindustrian, Bank Indonesia, data diolah

pengolahan yang dominan, dimana sumbangannya di atas 10 persen terhadap pembentukan PDB seperti juga industri alat angkut/mesin, industri kimia/pupuk/barang karet dan industri makanan/minuman/tembakau. Sejarah perkembangan ITPT di Indonesia

Hal-hal yang disebutkan di atas membuat beberapa kalangan dan pihak perbankan menganggap ITPT adalah sektor industri yang menuju kemunduran (*sunset industry*) dan efek lanjutannya adalah semakin sulitnya ITPT mendapatkan kredit modal kerja

ataupun kredit investasi dari perbankan. Dalam rangka mengkaji lebih lanjut fakta-fakta

signifikan sehingga mempersempit *gap* antara ekspor dan impor produk TPT.

Tabel 4. Tingkat utilisasi kapasitas produksi (%)

Sektor	1999	2000	2001	2002	2003	2004
TPT	84	81	81	65,1	66,6	70,6
Kimia	65,15	73,15	72,055	75,385	75,16	77,865
Agro	68	69,6	55,48	58,69	60,67	62,85
Rata-rata Industri	55,16	61,68	62,24	62,33	63,3	65,52

Sumber : Departemen Perindustrian, data diolah

mengenai situasi yang dialami oleh ITPT, berikut ini secara singkat dipaparkan beberapa aspek dari ITPT untuk memahami kondisi yang sebenarnya.

#### 1. Kinerja ekspor-impor.

Dibandingkan dengan sektor industri lainnya, pada tahun 2005-2006 ekspor ITPT merupakan penyumbang terbesar kedua setelah industri elektronika/telematika/mesin yaitu sekitar 13 persen dari total ekspor nonmigas. Namun demikian jumlah volume ekspor tersebut *relatif* stagnan sejak tahun 2000 sampai dengan 2007, sedangkan pada periode yang sama volume impor produk TPT justru menunjukkan *trend* peningkatan yang

Kondisi tersebut belum memperhitungkan fakta maraknya impor pakaian bekas ilegal dari negara kawasan asia timur, terutama Cina, yang permintaannya justru tinggi di kalangan menengah kebawah, sehingga sebenarnya surplus perdagangan produk TPT semakin menipis.

Dari segi daya saing produk yang diekspor, dua jenis produk TPT yaitu pakaian dan benang tenun/kain tekstil memiliki nilai RCA (*Revealed Competitive Advantage*) di atas 1, yang artinya mempunyai daya saing kuat. Selain itu ekspor produk TPT juga didominasi oleh kedua jenis produk yang kompetitif ini dan sumbangannya mencapai 11 persen—15

Tabel 5. Realisasi investasi tiga sektor industri terbesar

Tahun	TPT		KIMIA		MAKANAN	
	PMDN (Miliar Rp)	PMA (Juta US \$)	PMDN (Miliar Rp)	PMA (Juta US \$)	PMDN (Miliar Rp)	PMA (Juta US \$)
1993	3.441,20	423	7767,5	1176,7	2069,9	141,3
1994	5.518,39	396,5	5389,7	7760,2	4032,87	1240,5
1995	7.176,5	471,1	9021,55	19416,4	5147,55	1293,2
1996	3.365,72	513,8	12361,75	7296,3	13748,19	692
1997	6.797,90	333,4	22536,1	12376,5	13037,9	575,9
1998	1.137,40	217	15583,1	6178,7	6711,7	334,9
1999	2.524,30	240,3	2445,3	3268,4	12676	680,7
2000	2.386,34	400,4	56436	7402,3	8547,55	701,3
2001	2.222,90	330	22336,9	2309,9	11108,6	289,2
2002	440	89,9	1953,1	1872,7	4967,6	267,3
2003	2.111,70	123,1	30204,6	3034,6	4246,6	408,5
2004	1.476,80	407,9	3046,2	3413,5	10271,5	721,8
2005	710,4	139,5	1686,5	2878,9	8073	642,6
2006	1.279,00	156,4	24382	1528,4	13789,3	1036,2
2007	1.024,30	274,6	33396,7	15267,4	17847,7	1724,4
Jumlah	41.612,90	4.516,90	248.547,00	95.180,90	136.275,96	10.749,80

Sumber : Bank Indonesia, data diolah

persen nilai ekspor nonmigas dari sektor industri, meskipun *trend* perannya terhadap ekspor nonmigas mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

## 2. Produksi.

Dalam hal nilai tambah produksi, sumbangan dari sektor ITPT tahun 2001—2005 rata-rata 10,47 persen dari produksi total industri dan menempati urutan ketiga dibawah sektor makanan/minuman/tembakau dan kimia/barang karet/plastik. *Trend* produksi ITPT juga menunjukkan peningkatan meskipun proposinya terhadap total industri justru menunjukkan *trend* menurun.

Sedangkan dari segi utilisasi kapasitas produksi, pada tahun 1999-2001 industri TPT di atas 80 persen dan menempati peringkat pertama dibandingkan dengan sektor lainnya. Namun tahun 2002 dan 2003 merosot drastis sehingga posisinya dibawah utilisasi di sektor industri kimia yang persentasenya meningkat secara konsisten, meskipun demikian tingkat utilisasi sektor ITPT masih berada di atas rata-rata industri.

## 3. Investasi.

Data realisasi investasi di sektor ITPT baik yang bersumber dari PMDN maupun PMA tahun 1993-2007 menunjukkan bahwa setelah krisis moneter tahun 1997 investasi PMDN menurun drastis hingga 83,27 persen sedangkan investasi PMA turun sebesar 35 persen, disamping itu sektor TPT menempati urutan ketiga dalam hal realisasi investasi PMDN maupun PMA pada sektor industri pengolahan secara keseluruhan. Dibandingkan dengan dua sektor lain yang menjadi primadona investasi sektor industri, yaitu industri kimia/farmasi dan industri makanan, pola *trend* dan fluktuasi investasi PMA dan PMDN industri TPT *relatif* datar dengan *shock* pada tahun 1998 dan 2002, selain itu dari segi jumlah realisasinya juga lebih kecil.

Apabila dicermati lebih jauh, fakta ini menyiratkan bahwa investor memandang ITPT merupakan sektor industri yang risikonya lebih kecil dibandingkan industri

makanan maupun industri kimia yang realisasi investasinya sangat fluktuatif, walaupun secara logis hal tersebut berarti sektor ITPT mungkin tidak menawarkan keuntungan yang lebih baik bagi investor dibandingkan dengan industri kimia dan makanan.

## 3. PERMASALAHAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

Kondisi sebagaimana dideskripsikan di atas walaupun tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa ITPT tidak lagi memiliki prospek yang menarik, namun juga menyiratkan adanya permasalahan yang menjadi penyebab timbulnya tanda-tanda kemunduran. Masalah yang menjadi penyebab mundurnya kondisi ITPT sendiri berasal dari beberapa faktor internal dan eksternal industri. Dari sisi internal, kenyataan bahwa hampir 75 persen kondisi mesin ITPT telah mendekati umur 20 tahun membuat produksi menjadi tidak efisien dan kualitas tidak kompetitif. Penggunaan mesin pemintal yang usianya di atas 10 tahun misalnya, akan membutuhkan tambahan energi yang biayanya 4 persen dari nilai penjualan dan membutuhkan tambahan 60 persen jam kerja per kilogram benang yang dihasilkan, dibandingkan jika menggunakan mesin terbaru (FIAS, 2006). Peningkatan biaya produksi juga dipicu oleh kenaikan harga energi secara *global*, sedangkan pemerintah tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk memberikan subsidi BBM/listrik bagi industri sehingga membebani biaya produksi ITPT<sup>2</sup>. Hal lain yang turut membebani biaya produksi industri TPT adalah besarnya ketergantungan pada bahan baku impor yang mencapai 22,2 persen dari total *input* membuat industri ini rentan terhadap fluktuasi nilai tukar.

*Problem* internal lain adalah ketenagakerjaan, antara lain regulasi kenaikan

<sup>2</sup> Meskipun kenaikan harga energi secara logis juga akan meningkatkan biaya produksi, namun penelitian oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa pengaruh biaya energi hanya berkisar 6% dari seluruh biaya produksi pada sektor industri (kecuali industri semen).

upah buruh dan beragamnya tuntutan buruh yang semakin membebani pelaku industri TPT, ditambah lagi rendahnya produktivitas tenaga kerja pada ITPT dibanding sektor industri lainnya (BPS, 2005). Dari sisi pembiayaan, industri TPT merupakan sektor yang mempunyai ketergantungan tinggi pada perbankan untuk membiayai operasi maupun investasi dibandingkan dengan sektor industri lainnya. Sebagai ilustrasi, sejak tahun 1996 sampai dengan 2003 rata-rata 52,6 persen perusahaan dari ITPT bergantung pada pembiayaan dari perbankan (Bank Indonesia, 2005). Dengan kondisi yang sangat tergantung seperti ini, tingginya tingkat kredit macet (*Non Performing Loan/NPL*) pada sektor ITPT setelah krisis moneter yang di atas 10 persen (mencapai 23 persen pada tahun 2007) membuat Bank Indonesia membuat kebijakan kontraproduktif dengan menyarankan agar perbankan tidak menyalurkan kredit pada sektor ITPT, akibatnya ITPT kesulitan mendapatkan kredit modal kerja dan ekspansi produksinya terhambat oleh tidak tersedianya kredit untuk investasi. Dari segi daya saing produk, meskipun sebagian besar produk ekspor ITPT (benang tenun dan pakaian jadi) RCA-nya di atas 1, namun tujuan ekspornya sangat tidak terdiversifikasi yaitu sebagian besar (di atas 50 persen) diekspor ke Amerika Serikat, sehingga rentan terhadap gejolak ekonomi maupun politik negara tujuan ekspor utamanya.

Sedangkan dari sisi eksternal, serangan produk impor dari Cina yang kompetitif dari segi harga dan maraknya impor pakaian bekas ilegal semakin menggerogoti pangsa pasar ITPT dalam negeri, bahkan membuat beberapa pelaku ITPT beralih menjadi importir karena dianggap lebih menguntungkan daripada memproduksi sendiri. Dihapuskannya sistem kuota impor TPT pada beberapa negara tujuan ekspor ITPT Indonesia pada tahun 2005, membuat produk ekspor TPT Indonesia berhadapan *head to head* dengan negara yang produknya sangat kompetitif seperti Cina, India, Bangladesh dan Pakistan yang sebelumnya memiliki hubungan dekat dengan negara-negara penganut kuota. Faktor lain adalah ketatnya pengawasan dan syarat-

syarat *World Trade Organization* (WTO) terhadap komoditas ekspor Indonesia, akibatnya ruang bagi pemerintah semakin sempit untuk memberikan proteksi agar produk ITPT menjadi lebih kompetitif dalam bersaing dengan negara lain.

#### a. Subsidi untuk ITPT : Pengalaman dari India

Dari paparan mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh ITPT, benang merah yang dapat ditarik adalah bahwa sebenarnya ITPT merupakan sektor yang memiliki prospek dan cukup berprestasi dalam memberi sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari kinerja produksinya, sumbangannya terhadap ekspor nonmigas, tingkat investasi, serta penyerapan tenaga kerja pada sektor ini. Namun adanya permasalahan mendasar yaitu menurunnya efisiensi proses produksi ITPT memicu terjadinya kenaikan biaya produksi, penurunan produktivitas dan melemahnya daya saing produk baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Pemerintah memiliki pilihan untuk membantu pertumbuhan sektor ini, atau membiarkan saja ITPT mengalami kemunduran secara gradual sehingga akhirnya mati perlahan-lahan dan Indonesia bergantung pada impor produk TPT untuk memenuhi permintaan domestik.

Mengingat potensinya yang besar bagi perekonomian serta untuk mencegah terjadinya ketergantungan pada produk impor TPT, pemerintah telah berusaha meluncurkan beberapa paket kebijakan untuk meningkatkan efisiensi produksi ITPT antara lain dengan pembebasan PPN impor mesin TPT pada tahun 2003 dan yang paling baru adalah program subsidi restrukturisasi permesinan TPT pada tahun 2007. Dengan program subsidi ini pemerintah mengharapkan pengusaha ITPT menjadi terpacu untuk memperbaiki mesin produksinya sehingga terjadi efisiensi dan peningkatan produksi baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dalam sudut pandang mikro, program ini diharapkan akan meningkatkan utilisasi kapasitas produksi dan menurunkan biaya produksi sehingga membuat kurva biaya rata-rata lebih landai dengan kombinasi harga

yang lebih rendah dan output lebih banyak dalam jangka panjang<sup>3</sup>. Sedangkan secara makro program ini diharapkan akan meningkatkan jumlah penawaran (karena peningkatan produksi) maupun meningkatnya jumlah permintaan (karena perbaikan kualitas dan daya saing produk).

Pilihan pemerintah untuk memberikan subsidi dengan menjalankan program restrukturisasi mesin ITPT sendiri merupakan

*counter value duties* (sanksi bea masuk anti subsidi) dari WTO dan negara-negara tujuan eksportnya. Setiap proteksi dalam bentuk subsidi pada suatu komoditi akan menjadi sorotan dari negara-negara yang tergabung dalam WTO, untuk itu pemerintah harus lebih berhati-hati dalam menentukan skema subsidi untuk membantu ITPT agar tidak kontraproduktif bagi ITPT sendiri. Program restrukturisasi mesin ITPT dapat dikatakan

**Tabel 6. Perkembangan program TUFs**

Dalam *Crore* (10 juta) *Rupee*

	Permohonan yg diterima		Permohonan yg dikabulkan			Permohonan yg dicairkan	
	Jumlah Proyek	Total biaya proyek	Jumlah Proyek	Total biaya proyek	Jumlah subsidi	Jumlah Proyek	Jumlah subsidi
1999-2000	407	5.771	309	5.074	2.421	179	746
2000-2001	719	6.296	616	4.380	2.090	494	1.863
2001-2002	472	1.900	444	1.320	630	401	804
2002-2003	494	1.835	456	1.438	839	411	931
2003-2004	867	3.356	884	3.289	1.341	814	856
2004-2005	986	7.941	986	7.349	2.990	801	1.757
2005-2006	1.086	16.194	1.078	15.032	6.776	993	3.962

Sumber : [www.fibre2fashion.com](http://www.fibre2fashion.com)

alternatif yang paling memungkinkan karena produk TPT berorientasi ekspor sehingga sangat rentan dengan sanksi-sanksi seperti

lebih aman dari peraturan WTO karena yang menjadi sasaran program adalah efisiensi proses produksi (pengaruhnya kepada harga

**Tabel 7. Perbedaan Pembiayaan Industri Antara Indonesia dan India**

	Indonesia	India
Manfaat yang ditawarkan	Potongan harga pembelian mesin dan bantuan pembelian dengan modal padanan	Sangat bervariasi, mulai dari potongan harga, bantuan modal, subsidi bunga dll.
Dukungan lembaga pembiayaan	Bank Pemerintah /Swasta Nasional dan beberapa Lembaga Keuangan Bukan Bank ( <i>multifinance</i> )	Bank Pemerintah /Swasta Nasional dan Bank spesial menangani Industri ( <i>Industrial Development Bank of India, Small Industries Development Bank of India dan Industrial Finance Corp of India, Ltd</i> )
Kriteria mesin	Mesin produksi termasuk mesin penunjang ( <i>genset, pembangkit uap, forklift &amp; conveyor, dll.</i> )	Spesifik hanya untuk mesin produksi tertentu
Target industri	Tidak membedakan jenis dan skala ekonomi industri tekstil	Fokus pada industri tekstil tertentu dan memisahkan target berdasarkan skala ekonomi industri ( <i>SSI/small scale industri sector dan Non SSI sector</i> )

<sup>3</sup> Ilustrasi grafis dapat dilihat di Carlton & Perloff, *Modern Industrial Organization*, 2005, halaman 33.

tidak langsung), bukannya ditujukan pada produk akhir yang akan langsung mempengaruhi harga jual. Namun demikian,

hal tersebut berarti juga keberhasilan program ini dalam mempengaruhi produk akhir (harga jual, jumlah, maupun kualitas) sangat tergantung pada skema yang dirancang pemerintah, kesungguhan pelaku ITPT, dan kondisi eksternal yang kondusif.

Program restrukturisasi mesin ITPT merupakan adaptasi dari program subsidi sejenis yang telah dilaksanakan oleh pemerintah India melalui program *Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS)* yang dijalankan sejak tahun 1999. Pada saat itu kondisi ITPT di India hampir sama dengan Indonesia, ITPT merupakan sektor primadona di India, menyumbang tidak kurang 4 persen dari GDP, 14 persen dari output sektor industri dan mendominasi 17 persen dari ekspor nonmigasnya serta menyerap lebih kurang 35 juta tenaga kerja. Namun pada saat yang sama juga dihadapi persoalan yang menggerogoti pertumbuhannya yaitu, efisiensi serta kualitas produksi rendah karena mesin yang usang, skala ekonomi yang menurun, produktivitas tenaga kerja rendah dan kesulitan pembiayaan untuk memproduksi maupun ekspansi produk. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut pemerintah India meluncurkan program TUFS dengan tujuan menjaga dan meningkatkan daya saing produk TPT dalam jangka menengah dan panjang melalui bantuan modal yang memadai dan kontinyu agar ITPT dapat memperbarui teknologi mesinnya dengan skema pembiayaan yang terjangkau oleh pelaku industri.

Sejak dicanangkannya program TUFS pada 1 April 1999 sampai dengan tahun 2006, dana subsidi yang dicairkan rata-rata 1.559 crore Rupee per tahun. Perkembangan program ini pada tahun-tahun awal pelaksanaannya memang belum menggembirakan, banyaknya aplikasi yang diterima dan disetujui namun yang dieksekusi sangat sedikit menunjukkan masih belum siapnya pelaku industri maupun organisasi pendukung dalam menjalankan program ini. Hal ini disebabkan antara lain rendahnya utilisasi kapasitas produksi membuat pelaku industri enggan melakukan investasi dibandingkan pada saat utilitasnya sedang maksimal. Di samping itu lembaga pembiayaan termasuk

perbankan masih menganggap sektor ITPT adalah *sunset industry* yang resiko kredit macetnya tinggi, selain itu masalah birokrasi dalam pendaftaran, persetujuan dan pencairan untuk mendapatkan subsidi ini juga menjadi faktor yang menghambat. Namun mulai tahun 2002 perkembangannya realisasinya semakin membaik, dengan perbaikan/modifikasi skema yang diberlakukan ditunjang dengan kondisi permintaan yang membaik membuat pelaku industri bersemangat untuk melakukan investasi dengan peningkatan teknologi, bahkan program ini diperpanjang sampai dengan 2012 karena banyaknya permintaan dari pelaku industri TPT.

Program restrukturisasi mesin ITPT yang akan dilaksanakan oleh Indonesia memiliki beberapa kesamaan karakteristik atau fitur dengan program TUFS, namun dalam detailnya ada sedikit perbedaan. Berikut ikhtisar karakteristik kedua program tersebut:

Keberhasilan program TUFS yang dilaksanakan oleh pemerintah India dapat terlihat tidak saja melalui penyaluran subsidi yang semakin lancar dan diikuti oleh semakin banyak pelaku industri TPT, beberapa parameter makro ITPT India juga menunjukkan adanya peningkatan antara lain pertumbuhan sumbangan terhadap nilai ekspor-impor produk TPT dunia yang mencapai 49,4 persen untuk tekstil dan 57,2 persen untuk pakaian jadi (masuk peringkat lima besar dunia). Disamping itu program TUFS banyak diikuti oleh industri dengan skala ekonomi kecil yang selama ini merupakan sektor yang cenderung padat karya dan teknologinya tertinggal, sehingga program ini meningkatkan produksi maupun skala ekonomi sektor ini. Program TUFS juga meningkatkan daya saing produk TPT India, dari peringkat 43 dunia pada tahun 2000 menjadi peringkat 29 dunia pada tahun 2006.

#### 4. PENUTUP

Subsidi yang sering dianggap distorsi dalam perekonomian, sebenarnya juga diperlukan sebagai sarana bagi pemerintah untuk membantu sektor-sektor potensial yang mendapat kesulitan untuk berkembang. Dalam hal Industri TPT yang sempat dipersepsikan

sebagai *sunset industry*, terutama setelah banyaknya kredit macet pasca krisis moneter, sebenarnya menyimpan potensi ekonomi yang besar apabila pertumbuhannya tetap dijaga. Sebagai sektor yang berprestasi dalam menyumbangkan PDB, ekspor nonmigas, penggerak investasi dan penyerap tenaga kerja, ITPT yang saat ini sedang menghadapi *Problem* lemahnya daya saing akibat rendahnya efisiensi produksi layak mendapat bantuan dari pemerintah melalui subsidi langsung yang ditransmisikan dengan tepat.

Faktor-faktor yang layak diperhatikan oleh pemerintah dalam menyalurkan subsidi kepada ITPT adalah dengan membandingkan dengan program TUFS yang terbukti membawa hasil yang positif di India. Untuk itu program restrukturisasi mesin ITPT perlu diperkaya dengan variasi manfaat yang ditawarkan agar sesuai dengan kondisi anggaran pemerintah dan kebutuhan ITPT. Disamping itu kriteria mesin harus lebih spesifik pada mesin produksi agar tidak ada penyelewengan pembelian mesin penunjang (seperti *genset* dan *forklift*) yang mungkin dipakai pada sektor industri lain. Hal lain yang patut dicermati adalah fokus kepada industri kecil yang selama ini ketinggalan teknologinya, serta dukungan sektor pembiayaan yang optimal melalui kerjasama antara pemerintah dengan Bank Indonesia, karena tanpa dukungan pembiayaan, program ini tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana pengalaman dari awal perjalanan program TUFS di India.

Dengan formula kebijakan subsidi yang tepat maka sasaran peningkatan pertumbuhan ITPT yang dicanangkan akan tercapai secara optimal serta tidak menimbulkan dampak yang kontraproduktif, seperti enggannya pelaku ITPT mengikuti program maupun dampak eksternal seperti sanksi dari WTO dan negara tujuan ekspor. Akhirnya, kebijakan subsidi kepada ITPT merupakan salah satu subsistem dari kebijakan industri TPT secara keseluruhan. Untuk itu secara simultan tentu saja harus diikuti dengan perbaikan infrastruktur pendukung, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan investasi PMDN dan PMA serta diversifikasi negara tujuan ekspor selain Amerika Serikat (mengingat adanya ancaman

lesunya permintaan akibat krisis di Amerika Serikat), agar industri TPT bisa mengubah statusnya menjadi *sunshine industry*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Indian Manufacturing Industry: Techno-logy Status and Prospects*, UNIDO, 2005
- Wahyu Agung Nugroho, Tri Yanuarti, Endy Dwi Tjahjono, *Struktur Biaya dan Perilaku Pembentukan Harga Pada Industri Manufaktur di Indonesia*, Bank Indonesia Working Paper, Desember 2005
- Verma, Samar, *Export Competitiveness of Indian Textile and Garment Industry*, ICRIER Working Paper, November 2002
- Elevating the Competitiveness of Textile Industry*, BEI News 22<sup>nd</sup> Edition Year V, September-October 2004
- Improving Indonesia's Competitiveness: Case Study of Textile and Farm-Shrimp Industries*, FIAS-IFC/Worldbank, September 2006
- Ananthakrishnan, Prasad, and Sonali Jain-Chandra, *The Impact on India of Trade Liberalization in The Textiles and Clothing Sector*, IMF Working Paper, November 2005
- Biro Neraca Pembayaran Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, *Laporan Pemetaan Ekonomi Sektor Industri NonMigas*, Bank Indonesia, Desember 2006
- Carlo, Dennis W., and Jeffrey M. Perloff, *Modern Industrial Organization*, Pearson Addison Wesley, 2005.

